

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapi hampir semua bangsa di dunia. Kemiskinan pada umumnya ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan, gizi serta kesejahteraan penduduk. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki dan yang dimanfaatkan terutama dari tingkat pendidikan formal maupun non formal (Supriatna, 2000).

Defenisi kemiskinan itu sendiri menurut beberapa lembaga yaitu, Badan Pusat Statistik, adalah *“Kemiskinan adalah suatu kondisi seseorang yang hanya dapat memenuhi makanannya kurang dari 2100 kalori per kapita per hari”* (Tibyan, 2010). Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (2003), adalah *“tidak dapat melaksanakan ibadah menurut agamanya, seluruh anggota keluarga: tidak mampu makan dua kali sehari, seluruh anggota keluarga tidak memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian, bagian terluas dari rumahnya berlantai tanah, tidak mampu membawa anggota keluarga ke sarana kesehatan”* dan Bank Dunia adalah *“Kemiskinan adalah keadaan tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan USD 2,00 per hari(1US\$ = Rp. 10.000,00)”* (Yulianto, 2005).

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang penuh paradoks. Negara ini subur dan kekayaan alamnya melimpah, namun sebagian besar rakyatnya

tergolong masyarakat miskin. Menurut Zulyanto (2005) di Indonesia masalah kemiskinan selalu menjadi isu sentral yang mencakup segenap aspek kehidupan dalam masyarakat, yang tercermin pada rendahnya tingkat pendapatan, yang memberi dampak pada daya beli, rendahnya tingkat pendidikan sampai pada kualitas kesehatan yang memberikan pengaruh pada kualitas kehidupan secara keseluruhan.

Puncak krisis ekonomi pada tahun 1998 – 1999, penduduk miskin di Indonesia mencapai sekitar 24% dari jumlah penduduk atau hampir 40 juta orang. Pada tahun 2002 angka tersebut sudah turun menjadi 18% dan menjadi 14% pada tahun 2004. Situasi terbaik terjadi antara tahun 1987 - 1996 ketika angka rata - rata kemiskinan berada di bawah 20%, dan yang paling baik adalah pada tahun 1996 ketika angka kemiskinan hanya mencapai 11,3%.

Perkembangan kemiskinan yang terjadi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel. 1.1 berikut ini (www.bps.go.id).

Tabel. 1.1
Perkembangan Kemiskinan di Indonesia tahun 2006 – 2011

Tahun	Jumlah Penduduk miskin (dalam juta orang)		Presentase penduduk miskin (dalam persen)	
	Kota	Desa	Kota	Desa
2004	11,40	24,80	12,13	20,11
2005	12,40	22,70	11,68	19,81
2006	14,49	24,81	13,47	21,81
2007	13,56	23,61	12,52	20,37
2008	12,77	22,19	11,65	18,93
2009	11,91	20,62	10,72	17,35
2010	11,10	19,93	9,87	16,56
2011	11,05	18,87	9,23	15,72

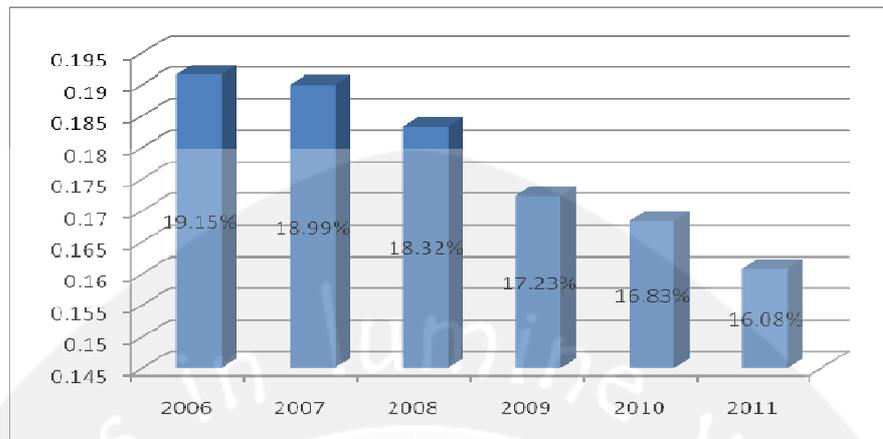
Sumber: BPS, Statistik Indonesia; diolah

Berdasarkan Tabel. 1.1 terlihat bahwa perbandingan penduduk desa dan kota yang miskin dari tahun 2006 sampai dengan 2011 terus mengalami

penurunan, tetapi meskipun mengalami penurunan presentase penduduk miskin masih di atas 10%. Alfian, Tan dan Soemardjan (1980) mengatakan ada dua kategori pengukuran tingkat kemiskinan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut merupakan suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup memenuhi kebutuhan pokok, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan kemiskinan relatif adalah perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah.

Tingkat kemiskinan propinsi DIY relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional maupun propinsi lainnya di Pulau Jawa, yaitu antara 15-19%. Namun bila dibandingkan dengan data kemiskinan 2010, di mana tingkat kemiskinan propinsi DIY pada tahun tersebut sebesar 16,83%, maka terjadi penurunan jumlah penduduk miskin antara periode 2009-2010. Namun apabila dikomparasikan dengan rata-rata tingkat kemiskinan Indonesia sebesar 13,33%, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan propinsi DIY masih di atas rata-rata garis kemiskinan Indonesia (Anonim, 2011).

Kuncoro (2004) menjelaskan bahwa rata-rata tingkat kemiskinan untuk Propinsi DIY tahun 2003 adalah 19,14%, dengan urutan yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi yaitu: kabupaten Gunung Kidul (25,19%), kabupaten Kulon Progo (25,11%), kabupaten Bantul (18,55%), kabupaten Sleman (15,53%), dan kota Yogyakarta (12,77%). Presentase penduduk miskin di Propinsi Yogyakarta dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 secara umum mengalami penurunan (Anonim, 2010).



Sumber: BPS, Statistik Indonesia; diolah

Gambar 1.1
Presentase Penduduk Miskin di Provinsi
D.I. Yogyakarta 2006 – 2011

Kabupaten Sleman sendiri yang merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk kabupaten yang mempunyai persentase penduduk miskin yang cukup tinggi yaitu 57.979 kepala keluarga atau 195.600 jiwa (Tribun Jogja 24 Februari 2011). Jumlah penduduk miskin Kabupaten Sleman dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten sekitarnya di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cukup menonjol. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3
Jumlah penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta 2006 – 2011 (dalam ribu orang)

Kabupaten/Kota	2006		2007		2008		2009		2010		2011	
	Juml	%	Juml	%	Juml	%	Juml	%	Juml	%	Juml	%
Bantul	178,2	20,25	169,3	19,43	164,33	18,54	159,23	18,54	152,23	17,22	146,48	17,20
Gunung Kidul	194,4	28,45	192,1	28,50	173,52	25,96	170,02	25,96	167,99	24,62	163,23	24,01
Kulonprogo	108,1	28,39	103,8	28,61	97,92	26,85	96,92	26,85	87,92	25,33	86,92	25,00
Sleman	128,1	12,70	125,4	12,56	125,05	12,34	124,05	12,34	122,05	12,01	119,15	11,94
Yogyakarta	45,2	10,22	42,9	9,78	48,11	10,81	47,11	10,81	47,11	10,71	45,11	10,02
D.I. Yogyakarta	648,7	19,15	633,5	18,99	608,93	18,02	597,33	17,23	577,30	16,83	560,89	16,08

Sumber: BPS, Statistik Indonesia; diolah

Proporsi penduduk miskin di kabupaten Sleman dari 17 kecamatan, terdapat empat kecamatan yang mempunyai proporsi penduduk miskin di atas 34% yaitu kecamatan Prambanan, Tempel, Sleman, dan Sayegan. Menurut kriteria keluarga miskin berdasarkan BKKBN, penduduk miskin dibagi menjadi 3 yaitu: *pertama*, proporsi penduduk miskin di atas 34%; *kedua*, proporsi penduduk miskin di antara 15-34%; *ketiga*, proporsi penduduk miskin di bawah 15%. Khusus untuk kecamatan Prambanan, rata-rata proporsi penduduk miskin tiap desa (mencakup desa Sumberharjo, Wukirharjo, Gayamharjo, Sambirejo, Madurejo, dan Bokoharjo) adalah sebesar 49%. Ini merupakan rata-rata proporsi penduduk miskin tertinggi dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya. Terdapat sepuluh kecamatan yang mempunyai proporsi penduduk miskin sebesar 15%-34% yaitu Minggir, Moyudan, Godean, Mlati, Turi, Pakem, Cangkringan, Ngemplak, Kalasan, dan Berbah. Sedangkan kecamatan yang memiliki proporsi penduduk kemiskinan di bawah 15% adalah kecamatan Gamping, Depok, dan Ngaglik.

Kemiskinan juga merupakan salah satu ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dan wilayah sehingga menyebabkan kemiskinan menjadi salah satu tema utama pembangunan nasional. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan acapkali diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan (Suryahadi dan Sumarto, 2001). Tentu hal ini mendorong pemerintah meluncurkan program-program pengentasan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin khususnya di daerah pedesaan. Program-program ini diharapkan dapat menciptakan perubahan

sosial yang melibatkan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini pemberdayaan fakir miskin merupakan upaya untuk memberikan kekuatan, kemampuan dan otoritas kepada orang-orang yang masuk kategori miskin agar mampu mengubah status sosial ekonominya di dalam masyarakat.

Upaya-upaya dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia telah dimulai awal tahun 1970-an diantaranya melalui program Bimbingan Masyarakat (Bimas) dan Bantuan Desa (Bandes). Pada dekade 1990-an pemerintah memunculkan kembali program pengentasan kemiskinan, diantaranya Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Pembangunan Prasarana Desa Tertinggal (P3DT), Tabungan Kesejahteraan Keluarga (Takesra) dan Kredit Keluarga Sejahtera (Kukesra). Tahun 2000-an pemerintah melalui Departemen Sosial melaksanakan program pengembangan Usaha Sosial Ekonomi Produktif (USEP), program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi fakir miskin (Remi dan Tjiptoherijanto, 2002).

Program-program pengentasan kemiskinan tersebut di atas yang saat sekarang masih dijalankan yakni Usaha Sosial Ekonomi Produktif (USEP), program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Sumodiningrat, 2009). Program ini berguna untuk menutupi penurunan daya beli mayoritas penduduk. Aktivitas-aktivitas dari program tersebut meliputi :

- 1) Program keamanan pangan dalam bentuk penyediaan beras murah untuk keluarga miskin

- 2) Pembinaan USEP (Usaha Sosial Ekonomi Produktif) dan KUBE (Kelompok Usaha Bersama).
- 3) Program padat karya untuk mempertahankan daya beli rumah tangga miskin.

Berdasarkan program-program di atas, salah satu bentuk usaha yang sering dijalankan adalah program USEP (Usaha sosial ekonomi produktif) melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama). Program ini dijalankan secara berkelompok dengan beranggotakan 20 sampai 30 orang per kelompok.

Usaha Sosial Ekonomi Produktif (USEP) ini biasanya disesuaikan dengan potensi lingkungan dan keterampilan yang dimiliki oleh pengurus atau anggotanya. Wilayah yang memiliki potensi pertanian seperti Jawa dan Sumatera dikembangkan melalui budidaya tanaman pangan atau palawija, budidaya tanaman hias dan lain-lain, sedangkan wilayah perkotaan yang menunjukkan kecenderungan usaha di bidang jasa ditingkatkan dengan pelatihan-pelatihan dan modal usaha dalam bentuk jasa seperti perbengkelan, salon dan lain-lain dan untuk daerah dengan hasil alam spesifik seperti rotan di Kalimantan didorong untuk menekuni usaha kerajinan rotan.

Sejak peluncuran program USEP dalam bentuk KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang dilakukan pemerintah pada tahun 2004 terus mengalami peningkatan. Hingga kini, telah terdapat kurang lebih 3.960 KUBE yang semula berjumlah 900 KUBE. Indikator dari keberhasilan KUBE adalah mereka mampu untuk mengembangkan usaha dan dapat menambah jumlah anggotanya. Keberhasilan program ini juga ditandai dengan pelaksanaan pertemuan antara Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dengan perwakilan UNICEF

pada tanggal 11 Januari 2011 dalam rangka studi banding mengenai kebijakan global di dalam sistem evolusi perlindungan masyarakat khususnya di negara berkembang dengan tujuan untuk mendokumentasikan mengenai perkembangan dan ciri khas dari sistem perlindungan masyarakat kemudian pendanaannya (www.depsos.go.id).

Menurut BPS, salah satu kecamatan dari sepuluh kecamatan yang mempunyai proporsi penduduk miskin di Sleman adalah Kecamatan Turi, dan salah satu desa yang menjadi perhatian dari pemerintah yang melaksanakan pemberdayaan fakir miskin adalah Desa Donokerto. Desa Donokerto adalah suatu desa yang mengalami kerusakan yang hebat pada peristiwa bencana Merapi dari hal tersebut, maka banyak program pengentasan kemiskinan yang dilakukan di desa tersebut.

Salah satu program pengentasan kemiskinan tersebut adalah program USEP yang dilakukan melalui KUBE. Menurut Perbud No.12 Tahun 2008 tersebut, orang yang layak menerima bantuan tersebut diutamakan bagi yang merintis lapangan kerja baru/mandiri bagi Korban Bencana Merapi, Keluarga Miskin, Tenaga pengangguran usia produktif, Korban PHK dan Kelompok penyandang difabel. Dana pemberdayaan tidak diperuntukan bagi kelompok usaha penerima dana pemberdayaan tahun 2006 – 2010, ataupun sedang/akan menerima bantuan/pinjaman penguatan modal dari program sejenis pada Tahun 2011, kecuali bagi kelompok usaha penerima dana yang telah kehilangan sebagian besar aset yang dimiliki akibat bencana Merapi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka penulis merumuskan masalah yaitu *“Apakah ada perbedaan pendapatan keluarga miskin sebelum dan sesudah program USEP”*

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu mengetahui perbedaan pendapatan keluarga miskin sebelum dan sesudah program USEP di Desa Donokerto.

1.4. Manfaat Penelitian

Tercapainya tujuan dan sasaran penelitian diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam bidang akademis maupun dalam bidang pemerintahan dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Dalam bidang akademis diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan terhadap program USEP dalam membantu pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah, sedangkan dalam bidang pemerintahan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu masukan dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program USEP.

1.5. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian yakni *“Ada perbedaan pendapatan keluarga miskin sebelum dan sesudah program USEP”*.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Isi dari pendahuluan mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Gagasan dalam landasan teori mencakup tentang tinjauan pustaka yang membahas teori tentang analisis pendapatan, distribusi pendapatan dan studi terkait.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode dasar, jenis dan sumber data, cara pengumpulan data, metode penelitian responden, definisi operasional dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Menguraikan tentang pengelolaan data yang dilakukan dengan menggunakan teori - teori yang telah di temukan ilmuwan sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, sekaligus memberikan saran, masukan bagi instansi - instansi terkait dalam penelitian guna memberikan kemajuan dari daerah yang diteliti.